

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi

- CST Kansil et.al, (2009). *Hukum Administrasi Daerah*, ala Permata Aksara, Jakarta.
- Daldjoeni dan Suyitno, (2004). *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, PT. Alumni Anggota IKAPI, Bandung.
- Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Penerbit NEM, Pekalongan.
- Djati Murjanto. (2011). *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nur, A. C., & Guntur, M, (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Publisher UNM, Makassar
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rama Portasya, (2019). *Evaluasi Tingkat Keberhasilan Penata Gunaan Lahan, Revetegasi Dan Penyelesaian Akhir Dalam Kegiatan Reklamasi Di Area Backfilling Pit 3 Timur PT. Bukit Asam TBK. Tanjung Enim, Sumatera Selatan*, (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)
- Sianipar, D. A, (2020). *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Sitorus, M, (2003). *Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jambi.
- Sudrajat, N,(2013). *Teori dan Praktik Pertambangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Suharno, (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijaka.*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.

## Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2017). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-13.
- Ara Hidayat, Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun (2015).
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). *Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal administrasi publik, 7(101).
- Fitriyanti, R. (2016). *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*. Jurnal Redoks, 1(1).
- Hanapi, R. A., Ahmad, H. K., & Aswandi, R. (2019). *Komisi Pengelola Dana Jaminan Reklamasi Dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tambang Batu Bara*. Legislatif, 151-166.
- Hidayat, L. (2017). *Pengelolaan lingkungan areal tambang batubara (studi kasus pengelolaan air asam tambang (Acid Mining Drainage) di PT. bhumi rantau energi kabupaten tapin kalimantan selatan)*. ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora), 7(1), 44-52.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). *Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang (Studi kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 26(2), 130-146.
- Hirfan, H. (2018). *Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang*. Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(1), 101-108.
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon)*. Indonesian Journal of Health Ecology, 12(2), 80463
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, Tahun (2011).
- Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, Tahun (2020).
- Nuronia, K., Khalikussabir, K., & Mahardani, A. S. (2024). Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan

Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Islam. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 13(01), 1270-1277.

- Prayogo, A. L. (2018). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*. *Lentera Hukum*, 5, 449.
- Putra, E. E., & Epriadi, D. (2021). *Dampak Reklamasi Di Kawasan Pesisir Pulau Batam Terhadap Keberlangsungan Hidup Nelayan Sekitar*. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(4).
- Revanus, R. (2020). *Tinjauan Masalah Penerapan Sanksi Administrasi Terkait Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 1-15.
- S Hirfan, H. (2018). *Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang*. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(1).
- Soeda, E. S., Pioh, N., & Kasenda, V. (2017). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- S. Oktorina, S. (2018). *Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: studi kasus tambang batubara Indonesia*. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 16-20
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). *Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan*. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188-216.
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). *Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98-115.
- Wasis, B. (2011). *Dampak tambang pasir terhadap vegetasi dan sifat tanah di Kawasan Kebun Campuran dan Pertanian, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB. ResearchGate DOI, 10.
- Winasis Yulianto, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014.
- Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). *Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi*. *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip*, 9(2), 76-84.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

